

## Kemhan Membentuk 5 Batalion Komponen Cadangan, Ini Rinciannya

JAKARTA (IM) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) rencananya pembentukan 5 Batalion dari program Komponen Cadangan Komcad Tahun 2022. Nantinya, Matra Darat akan memiliki 3 batalion, dan Matra Laut dan Udara masing-masing 1 Batalion.

Adapun 1 Batalion terdiri dari 500 orang. Untuk Matra Darat, 500 orang di Kodam II/Swj, Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XIV/Hasanuddin.

Kemudian 500 orang Matra Laut di Kodikmar Surabaya, serta 500 orang Matra Udara di Pusdiklat Pasgat, Bandung.

Diraumdahan Ditjen Potan Kemhan Brigien TNI Fahrid Amran mengatakan, pembentukan Komcad merupakan persiapan dini pembangunan sistem pertahanan negara. Nantinya, untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama (TNI).

Lebih jauh dikatakan, Komcad tak hanya berupa

sumber daya manusia yakni warga negara, melainkan juga berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional yang telah disiapkan.

“Kesiapsiagaan itu, sebagai wujud usaha negara dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer,” kata Fahrid dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (21/3).

Dalam hal pengelolaan, Komcad dilaksanakan berdasar kebijakan umum pertahanan negara, dengan menerapkan sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan. Selain itu, hak asasi manusia juga dihormati dan menaati peraturan perundang-undangan.

“Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara secara sukarela serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara, sehingga komponen cadangan bukan wajib militer,” ujarnya. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## KEPALA OTORITA IKN KUNJUNGI KPK

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantera, Bambang Susantono (kiri) berjalan bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (kanan) usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3). Kepala Otorita IKN melakukan konsultasi untuk memastikan tata kelola IKN berlangsung dengan baik.

## KPK Endus Kongkalikong Pengurusan Usulan DAK dan DID Kota Balikpapan

Dugaan adanya kesepakatan jahat antara beberapa oknum pejabat terkait pengurusan usulan DAK dan DID terungkap setelah penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi.

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya kongkalikong jahat antara sejumlah oknum penyelenggara negara terkait pengurusan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kota Balikpapan. KPK menduga ada kesepakatan jahat untuk mempercepat proses usulan hingga

pencairan DAK dan DID Kota Balikpapan.

Kesepakatan jahat ini terungkap setelah penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di antaranya, HM Rizal Effendi (mantan Wali Kota Balikpapan), Sayid Muh Fadli (Sekda Kota Balikpapan), Madram Muchyar (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), Tara Allorante merupakan mantan Kadis

PU Kota Balikpapan, serta dua pihak swasta, Pahala Simamora dan Mohammd Suadi.

“Para saksi memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi terkait dengan pengurusan usulan dana DAK dan DID Kota Balikpapan yang diduga ada kesepakatan tertentu dengan pihak yang terkait dengan perkara ini agar usulan hingga pencairan kedua dana dimaksud segera diproses,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (21/3).

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat (18/3)

lalu. Penyidik menduga para saksi tersebut mengetahui adanya dugaan kongkalikong pengurusan dana untuk Kota Balikpapan.

Sebagai informasi, KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. “Benar KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan korupsi pengurusan dana DAK 2018. Konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan setelah penyidikan cukup,” kata Ali.

KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. Mereka di antaranya adalah,

Amin Santono (anggota Komisi XI DPR RI), Yaya Purnomo (eks Pejabat Kemenkeu), Sukiman (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019).

Kemudian, Natan Pasomba (Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua), Budi Budiman (Wali Kota Tasikmalaya), Kharuddin Syah alias Buayang (Bupati Labuhanbatu Utara, Puji Suhartono (mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), dan Irgan Chairul Mahfiz (Anggota DPR RI periode 2014-2019).

Diduga, masih banyak pihak lain yang terlibat atau disinyalir menerima aliran uang korupsi terkait pengurusan DAK ini. KPK saat ini masih terus mengembangkan perkara ini dan membidik tersangka lainnya. ● han



## RANGKAIAN G20 DI YOGYAKARTA

Seorang peserta belajar membuat kue sebelum mengikuti acara G20 Water Dialogue di Hotel Tentrem, Sleman, Di Yogyakarta, Senin (21/3). Pertemuan yang berlangsung 21 hingga 24 Maret 2022 tersebut dihadiri delegasi anggota G20 untuk membahas isu lingkungan dan air.

## KPK Telusuri Aliran Uang dari Para ASN Pemkab Sidoarjo

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan aliran uang yang bersumber dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk pihak yang sedang disidik.

Penyidik menelusuri aliran uang panas tersebut dengan mengorek keterangan sejumlah saksi, di antaranya Sulaksono yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo, Ainun Amalia merupakan mantan Camat Prambon, M Bachruni Aryawan merupakan Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo.

Kemudian Noer Rochmawati menjabat Kepala BPKAD Sidoarjo, Haryono yang kini menjabat Seksi Pelaksana Dinas Perikanan, Sutarti menjabat Staf Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, serta R Novianto Kresno Adiputro merupakan Ajudan Bupati Sidoarjo.

Para saksi dikonfirmasi soal dugaan aliran uang untuk pihak yang sedang disidik

KPK pada Jumat (18/3) di kantor Polresta Sidoarjo.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan penerimaan sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini yang berasal dari para ASN di Pemkab Sidoarjo,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (21/3).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Penyidikan gratifikasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo tersebut terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja tersangka serta konstruksi perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Diduga, penyidikan gratifikasi ini berkaitan dengan perkara suap yang menjerat mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ulah.

Saiful Ulah diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak saat menjabat Bupati Sidoarjo. ● han

## Munarman: Dakwaan Gerakkan Orang untuk Lakukan Terorisme Tak Terbukti

JAKARTA (IM) - Mantan sekretaris umum, Front Pembela Islam (FPI), Munarman menjalani sidang lanjutan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan oleh terdakwa Munarman.

Dalam pleidoi yang dibacakannya, Munarman menyebutkan bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya sama sekali tidak terbukti.

“Tidak ada satupun kata atau kalimat saya yang mengandung tujuan untuk menggerakkan orang melakukan tindakan terorisme,” ujarnya saat membacakan pleidoi di PN Jakarta Timur, Senin (21/3).

Munarman mengatakan, tuduhan yang dilayangkan saat menghadiri acara seminar berkedok baiat ISIS tidak

bisa dijadikan sebagai dasar logika manasibkannya sebagai orang berpengaruh dalam aksi terorisme di Indonesia.

“Tidak ada kalimat saya untuk ke baiat, hijrah atau kekerasan dalam bentuk apapun, seperti menyuruh membunuh, menculik, menyuruh menghancurkan benda-benda objek vital,” katanya.

Atas dasar tersebut, Munarman menyebutkan, dakwaan JPU terkait menggerakkan orang untuk melakukan terorisme terkesan dipaksakan. Itu terbukti, dari hasil persidangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

“Seolah-olah kalimat saya merupakan faktor pemicu orang lain untuk melakukan pemufakatan jahat melakukan terorisme dengan sengaja menyesatkan makna dari kalimat yang saya ucapkan,” katanya. ● han

## Haris Azhar Tegaskan Dirinya Siap Ditahan Polisi Kapan Saja

JAKARTA (IM) - Direktur Lokataru Haris Azhar menegaskan, dirinya siap menjalani proses hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan. Ia pun menyatakan siap ditahan kapan saja.

“Jadi walaupun saya sampai ditahan hari ini atau kapan pun ditahan, itu enggak ada masalah,” ujar Haris di Polda Metro Jaya, Senin (21/3).

Haris juga mempertanyakan prosedur hukum yang menjerat dirinya sebagai tersangka. Sebab, ia mengaku sudah banyak membuat laporan namun tidak pernah diproses oleh kepolisian termasuk Polda

Metro Jaya. Di sisi lain, laporan Luhut malah jadi prioritas kepolisian.

“Karena orang-orang yang dibungkam ini sudah punya banyak laporan ke polisi tapi tidak pernah ditanggapi termasuk Polda Metro. Ketika bicara prioritas laporan Luhut Binsar Panjaitan, maka tunjukkan kepada saya dalam KUHAP pasal mana yang memberikan makna prioritas dan perlu di dahulukan,” ujar Haris.

Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada Jumat (17/3). Status tersangka yang diberikan penyidik Polda Metro Jaya pada keduanya itu, didasari Surat

Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing dengan Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsub dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsub tertanggal 17 Maret 2022.

Sebelumnya Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor STTL/P/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut melaporkan terkait video yang diunggah di akun YouTube bulan Agustus 2021 yang bertajuk “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Adal!?” ● han

## Ungkap Info Intelijen, Rapat DPR dan Densus 88 Digelar Tertutup

JAKARTA (IM) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala Denstasemen Khusus 88 Anti Teror (Ka Densus 88 AT) Poli, dengan Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin (21/3) siang digelar secara tertutup.

Hal ini berdasarkan permintaan Ka Densus 88 AT dan Deputi II BNPT Irjen Ibnu Suhendra, karena, mereka akan menyampaikan informasi Intelijen dan kasus-kasus terorisme yang tengah dalam proses penyidikan.

Sebelum membuka RDP, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto awalnya menanyakan terlebih dahulu kepada matra kerja mengenai sifat RDP pada siang ini.

“Saya membuka rapat pada hari ini, sebelum saya membuka rapat saya akan bertanya kepada Ka Densus dan Deputi BNPT sebaiknya rapat ini dinyatakan terbuka atau tertutup?,” tanya Bambang selaku pimpinan RDP di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3).

Kemudian, Ka Densus 88

AT, Irjen Marthinus Hukum menyampaikan, karena adanya Materi yang bersifat data-data intelijen, dan ada kasus-kasus yang dalam proses penyidikan, maka ia meminta rapat digelar tertutup.

“Karena mengingat materi yang kami sampaikan berkaitan dengan informasi-informasi intelijen, dan banyak juga sedang on going proses penyidikan sehingga kami berharap rapat dilakukan tertutup,” kata Marthinus dalam RDP.

Hal senada juga disampaikan Deputi II BNPT yang meminta RDP digelar secara tertutup.

Lalu, Bambang menyatakan RDP digelar secara tertutup. Namun dengan catatan bahwa akan digelar konferensi pers sesuai RDP nanti.

“Oke terima kasih, rapat kita katakan tertutup dengan catatan setelah rapat kita laksanakan pers conference, sehingga pers conference bisa disaring. Ini pertanggungjawaban kita kepada publik,” ujarnya.

“Rapat saya nyatakan tertutup,” KATA Bambang sembari mengetuk palunda tanda rapat dimulai. ● han

## 8 Tahun Tinggal Ilegal di Bali, Bule Asal Australia Ditahan

DENPASAR (IM) – Seorang bule asal Australia bernama James Allan (58) ditahan gara-gara delapan tahun tinggal secara ilegal di Bali. Kini dia menunggu persidangan.

“Penahanan yang bersangkutan dititipkan di Rudenim Bali,” kata Kasi Intel Kejadi

Badung I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, Senin (21/3).

Allan dilimpahkan ke Kejari Badung setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh penyidik Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Kejari Badung telah menunjuk jaksa yang nantinya akan menangani perkara ini di pengadilan.

Jaksa juga tengah menyiapkan surat dakwaan. “Untuk jadwal sidang masih menunggu dari Pengadilan Negeri Denpasar,” imbuh Bamaxs.

Allan diamankan tim pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Ngurah Rai karena tidak dapat menunjukkan dokumen ijin tinggal. Bule asal New South Wales itu datang ke Bali pada 24 Desember 2014 menggunakan visa kunjungan. ● mei



## EKSPEDISI RUPIAH BERDAULAT DI DAERAH 3T

Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Eva Aderia Simanjuntak (kiri) memberikan Ucut Bank Nota kepada Komandan Lantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI Heribertus Yudho Warsono (kanan) dalam kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat di wilayah NTT untuk pulau terdepan, terluar dan terpencil (3T), di Lantamal VII Kupang, NTT, Senin (21/3). Bank Indonesia menyiapkan uang baru senilai Rp3 miliar dalam kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat di lima pulau 3T di wilayah NTT yang kegiatannya berlangsung sejak Senin (21/3) sampai Sabtu (26/3).

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI, tanggal 18 Maret 2022 Nomor 26, dibuat dihadapan MARCHIVA RAHMANI, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan. Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI, berkedudukan di Kabupaten Buleleng - Bali (selanjutnya disebut Perseroan) telah memutuskan membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta telah menyetujui pengangkatan Tuan SOENOE SOEWARDO sebagai Likuidator Perseroan. Kepada para pihak yang mempunyai kepentingan atas tagihan terhadap Perseroan, harap segera mengajukan tagihan-tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan pada alamat:

PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI

Jalan Pura Segara, Banjar Dinas Panjingan,

Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, BALI

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bali, 22 Maret 2022

Likuidator

PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI

### PENGUMUMAN

Direksi PT PANIMAX INTI MINING, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengalihan seluruh saham dalam Perseroan sehingga menyebabkan perubahan pengendalian Perseroan.

Keberatan atau sanggahan atas pengalihan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT PANIMAX INTI MINING

Gedung Puri Matari 2, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kav. H1-H2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 dan ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Maret 2022

Direksi Perseroan